

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. IKATAN, PERJANJIAN SIGNIFIKAN, DAN LAINNYA

a. Pembelian barang modal

Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah ikatan pembelian barang modal adalah sebesar Rp11.272 miliar dan US\$223 juta.

Jumlah di atas termasuk perjanjian-perjanjian signifikan berikut:

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Telkomsel dan PT Phincon	12 September 2019 - 11 September 2027	Perjanjian dan Pengadaan <i>Development and Rollout Agreement ("DRA")</i> dan <i>Technical Support Agreement ("TSA")</i> <i>Customer Relationship Management ("CRM") Solution System Integrator</i>
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia, PT Huawei Tech Investment, dan PT ZTE Indonesia	1 Februari 2021 - 31 Januari 2027	Perjanjian Pengadaan <i>Radio Ultimate Solution ("ROA")</i> dan <i>TSA</i>
Telkomsel, PT Sempurna Global Pratama, PT Lintas Teknologi Indonesia, dan PT Ericsson Indonesia	1 September 2021 - 31 Agustus 2024*	Perjanjian Pengadaan <i>Next Generation of Gateway GPRS Support Node ("GGSN") (Virtualized EPC)</i>
Telkomsel, Amdocs Software Solutions Limited Liability Company, dan PT Application Solutions	8 Oktober 2024 - 7 Oktober 2029	Perjanjian <i>Online Charging System ("OCS")</i> dan <i>Service Control Points ("SCP") System Solution Development</i>
Telkomsel dan PT Application Solutions	8 Oktober 2024 - 7 Oktober 2029	<i>TSA</i> untuk <i>OCS</i> dan <i>SCP</i>
Telkomsat dan Thales Alenia Space France ("TAS")	28 Oktober 2021 - 27 Oktober 2037	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Sistem Satelit HTS 113BT
Telkomsel dan PT Ericsson Indonesia	13 Februari 2022 - 12 Februari 2025	Perjanjian Pengadaan <i>CS Core Solution ROA</i> dan <i>TSA</i>
Telkomsel dan PT Lintas Teknologi Indonesia	13 Februari 2022 - 12 Februari 2025	Perjanjian Pengadaan <i>CS Core Solution ROA</i> dan <i>TSA</i>
Telkomsel dan PT Huawei Tech Investment	24 Maret 2022 - 24 Maret 2025	Perjanjian Pengadaan <i>GGSN</i>
Telkomsat dan Space Exploration Technologies Corporation ("SpaceX")	19 April 2022 - 30 Juni 2025	Perjanjian Pengadaan Jasa Peluncuran Satelit HTS 113BT
TDI dan PT Nusacipta Indonesia	1 Juli 2024 - 12 Juni 2025	<i>Pilling and Cut & Fill</i> untuk <i>Project Bromo</i>
TDE dan PT ZTE Indonesia	14 Oktober 2024 - 14 Oktober 2027	Perjanjian Kontrak terhadap <i>General Contractor (GC)</i> untuk Proyek <i>Delta Level-2 Fit Out Works</i>
Perusahaan dan PT Master System Infotama	9 Desember 2024 - 6 Juni 2025	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Ekspan IP <i>Backbone</i> Platform Cisco
Perusahaan dan PT ZTE Indonesia	12 Desember 2024 - 25 September 2025	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OTN Metro (OTM) <i>Future State Architecture (FSA)</i> - Platform ZTE
Perusahaan dan PT Lintas Teknologi Indonesia	13 Desember 2024 - 28 Juni 2025	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OTN Metro (OTM) <i>Future State Architecture (FSA)</i> - Platform Nokia
Perusahaan dan PT Packet Systems Indonesia	18 Desember 2024 - 28 Juli 2025	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OTN Metro (OTM) <i>Future State Architecture (FSA)</i> - Platform Huawei
Perusahaan dan PT Datacomm Diangraha	27 Desember 2024 - 28 Juni 2025	Pengadaan dan Pemasangan <i>Multi Service Aggregation (MSA)</i> Platform Nokia
Perusahaan dan PT Huawei Tech Investment	31 Desember 2024 - 28 Juni 2025	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Ekspan <i>MSA, WAG, BNG, dan PCEF Wifi Platform Huawei</i>

* Telkomsel saat ini sedang melakukan proses perpanjangan perjanjian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. IKATAN, PERJANJIAN SIGNIFIKAN, DAN LAINNYA (lanjutan)

b. Perjanjian pinjaman dan fasilitas kredit lainnya

- (i) Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan memiliki fasilitas bank garansi untuk jaminan penawaran (*tender bond*), pelaksanaan (*performance bond*), pemeliharaan (*maintenance bond*), setoran jaminan, dan uang muka (*advance payment bond*) berbagai proyek Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

Kreditur	Jumlah fasilitas	Akhir periode fasilitas	Mata uang asal	Fasilitas yang digunakan
BRI	500	14 Maret 2026	Rp	10
BNI	500	31 Maret 2025	Rp	49
Bank Mandiri	500	21 Juni 2025	Rp	180
Jumlah	1.500			239

Perusahaan memiliki fasilitas bank yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Catatan 37b.v).

- (ii) Pada tanggal 31 Desember 2024, Telkomsel memiliki fasilitas bank garansi untuk berbagai macam proyek sebagai berikut:

Kreditur	Jumlah fasilitas	Akhir periode fasilitas	Mata uang asal	Fasilitas yang digunakan
BRI	1.000	25 September 2028	Rp	618
BNI	2.100	11 Desember 2025	Rp	1.459
	3.100			2.077

Fasilitas bank garansi dengan BRI dan BNI sebagian besar untuk *performance bond* dan *surety bond of radio frequency* (Catatan 35c.i)

- (iii) Telin memiliki fasilitas bank garansi dari Bank Mandiri dan BRI dengan batas kredit maksimum masing-masing sebesar US\$25 juta dan US\$5 juta atau setara dengan Rp403 miliar dan Rp81 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2024, tidak terdapat fasilitas bank garansi yang digunakan.

c. Lainnya

- (i) Penggunaan frekuensi radio

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999, penggunaan spektrum frekuensi radio dan biaya penggunaan frekuensi radio ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 025/TEL.01.02/2022 Tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022, Menkominfo memberikan hak kepada Telkomsel untuk layanan telekomunikasi bergerak dengan pita frekuensi radio di 800 MHz, 900 MHz, 1.800 MHz, 2,1 GHz, dan 2,3 GHz; dan layanan telekomunikasi dasar.

Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 509 Tahun 2016, No. 1896 Tahun 2017, No. 806 Tahun 2019, No. 620 Tahun 2020, No. 178 Tahun 2021 dan No. 479 Tahun 2022, No. 90 Tahun 2023 dan No. 188 Tahun 2023 Telkomsel disyaratkan antara lain, untuk:

1. Menyerahkan *surety bond* setiap tahunnya sebesar Rp1,03 triliun untuk pita frekuensi 2,3 GHz.
2. Menyerahkan *surety bond* setiap tahunnya sebesar Rp360 miliar untuk pita frekuensi 2,3 GHz Blok A dan C.
3. Menyerahkan *surety bond* sebesar Rp617 miliar untuk pita frekuensi 2,1 GHz.
4. Membayar iuran tahunan Biaya Hak Penyelenggara ("BHP") selama jangka waktu lisensi sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan. BHP terutang pada saat diterimanya Surat Pemberitahuan Pembayaran dari DJPPI. Iuran tahunan BHP terutang sampai dengan berakhirnya periode lisensi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. IKATAN, PERJANJIAN SIGNIFIKAN, DAN LAINNYA (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(i) Penggunaan frekuensi radio (lanjutan)

Berikut adalah izin penggunaan frekuensi radio pada Telkomsel, atas izin tersebut Telkomsel terutang BHP setiap tahun hingga masa lisensi berakhir:

1. Pita frekuensi radio 800 MHz, 900 MHz, dan 1.800 MHz

Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 620 Tahun 2020, terkait dengan perpanjangan penetapan pita frekuensi radio 800 MHz, 900 MHz, dan 1.800 MHz, sehingga Telkomsel harus membayar biaya penggunaan frekuensi tahunan pada tahun 2020 sampai 2030.

2. Pita frekuensi radio sampai 2,1 GHz

No. Izin	Deskripsi
Surat Keputusan Menkominfo No. 90 Tahun 2023 amd. Surat Keputusan Menkominfo No. 76 Tahun 2023	Pada 27 Februari 2023, Telkomsel memperoleh izin penggunaan tahunan atas penggunaan pita frekuensi radio 1.975 - 1.980 MHz berpasangan dengan 2.165 - 2.170 MHz sampai dengan 18 Maret 2033.
Surat Keputusan Menkominfo No. 509 Tahun 2016 amd. Surat Keputusan Menkominfo No. 76 Tahun 2023	Menkominfo menyetujui Telkomsel untuk perpanjangan izin atas penggunaan pita frekuensi 1.970 - 1.975 MHz berpasangan dengan 2.160 - 2.165 MHz sampai dengan 28 Maret 2026.
Surat Keputusan Menkominfo No. 806 Tahun 2019 amd. Surat Keputusan Menkominfo No. 76 Tahun 2023	Menkominfo menyetujui Telkomsel untuk perpanjangan izin atas penggunaan pita frekuensi 1.965 - 1.970 MHz berpasangan dengan 2.155 - 2.160 MHz sampai dengan 30 September 2029.
Surat Keputusan Menkominfo No. 479 Tahun 2022 amd. Surat Keputusan Menkominfo No. 76 Tahun 2023	Telkomsel sebagai pemenang lelang dan berhak atas penggunaan tahunan atas pita frekuensi radio 1.960 - 1.965 MHz berpasangan dengan 2.150 - 2.155 MHz, terhitung sejak 11 Januari 2023 sampai dengan 10 Januari 2033.

3. Pita frekuensi radio sampai 2,3 GHz

No. Izin	Deskripsi
Surat Keputusan Menkominfo No. 1896 tahun 2017	Telkomsel sebagai pemenang atas hak penggunaan pita frekuensi radio 2.300 - 2.330 Mhz sampai dengan 2026.
Surat Keputusan Menkominfo No. 178 Tahun 2021	Telkomsel sebagai pemenang atas penggunaan pita frekuensi radio 2.330 - 2.340 MHz berpasangan dengan 2.340 - 2.350 MHz masing-masing untuk Blok A dan C sampai dengan 2030.
Surat Keputusan Menkominfo No. 487 Tahun 2022 amd. Surat Keputusan Menkominfo No. 92 Tahun 2023	Pada 18 November 2022, Telkomsel memperoleh pengalihan hak penggunaan pita frekuensi radio 2.340 - 2.355 MHz berpasangan dengan 2.330 - 2.360 MHz sampai dengan 17 November 2029.
Surat Keputusan Menkominfo No. 188 Tahun 2023	Pada 18 April 2023, Telkomsel diberikan persetujuan untuk mengalihkan sebagian hak penggunaan spektrum frekuensi radio 2,3 GHz kepada PT Smart Telecom.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. IKATAN, PERJANJIAN SIGNIFIKAN, DAN LAINNYA (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(ii) Perjanjian kerjasama spektrum frekuensi radio

Menkominfo memberikan persetujuan atas kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio kepada Telkomsel dan KCIC melalui Surat Keputusan No. B-171/M.KOMINFO/SP.01.01/03/2023 tanggal 17 Maret 2023 mengenai Persetujuan Kerja Sama Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada rentang 891 - 895 MHz berpasangan dengan 936 - 940 MHz, dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 14 Desember 2030.

Sebagai akibat dari perjanjian ini, KCIC akan membayar sejumlah kompensasi kepada Telkomsel yaitu kompensasi biaya penggunaan tahunan sebesar Rp878 miliar per tahun, biaya jaringan pengganti sebesar Rp1.250 miliar, serta biaya operasional dan perawatan tambahan.

(iii) Perjanjian kerjasama sebagai pemasok produk Google

Pada tanggal 10 November 2022, Sigma dan PT Google Cloud Indonesia ("Google") menandatangani perjanjian kerjasama yang memberikan wewenang kepada Sigma sebagai pemasok produk Google. Perjanjian ini mensyaratkan Sigma untuk memenuhi komitmen minimum pembelian produk Google selama tiga tahun dan berkewajiban untuk membayar selisih antara realisasi nilai pembelian produk Google dengan komitmen minimum tersebut.

(iv) Perjanjian Jual Beli Bersyarat Telkomsel dengan PT Dhost Telekomunikasi Nusantara ("Dhost")

Pada tanggal 26 Juni 2024, Telkomsel menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat dengan Dhost untuk penjualan 850 unit *in-building telecommunication coverage antenna system* ("IBS") dengan jumlah imbalan sebesar Rp685 miliar. Kemudian 689 unit dari IBS tersebut digunakan oleh Dhost untuk memenuhi jasa *in-building coverage* kepada Telkomsel. Transaksi ini tidak memenuhi kriteria sewa berdasarkan PSAK 116 dan Telkomsel mencatat keuntungan penjualan sebesar Rp642 miliar.

(v) KPU

Pada tanggal 27 Desember 2011, Telkomsel (atas nama Konsorsium Telkomsel, konsorsium yang dibentuk dengan Mitratel pada 9 Desember 2011) ditunjuk oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika ("BPPPTI"), sekarang Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ("BAKTI"), sebagai penyedia Program KPU di daerah perbatasan dengan total harga sebesar Rp261 miliar. Pada tahun 2015, program tersebut dihentikan. Pada Januari 2016, Telkomsel mengajukan klaim arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") terkait penyelesaian dari sisa piutang atas penyelenggaraan program tersebut.

Pada tanggal 22 Juni 2017, Telkomsel menerima surat keputusan BANI No. 792/1/ARB-BANI/2016 yang menginstruksikan BAKTI untuk membayar kompensasi kepada Telkomsel sebesar Rp218 miliar, dan sampai penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini Telkomsel telah menerima pembayaran dari BAKTI sebesar Rp91 miliar (sebelum dikurangi pajak) dan sisa kompensasi masih belum dibayarkan.

Menkominfo menerbitkan Peraturan Menkominfo No. 5 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 yang menggantikan peraturan sebelumnya terkait kebijakan program KPU. Peraturan tersebut mengharuskan penyelenggara telekomunikasi untuk memberikan kontribusi sebesar 1,25% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi (dengan mempertimbangkan piutang tidak tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi dan/atau beban interkoneksi dan/atau beban ketersambungan dan/atau pendapatan yang tidak diperhitungkan sebagai pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi) untuk pengembangan KPU.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 827/KOMINFO/BAKTI.31/KS.1/10/2021 tanggal 4 Oktober 2021, BAKTI memberikan kepada Telkomsel sebagai mitra kerjasama operasi ("KSO") untuk delapan paket KSO, yang meliputi Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua Barat, Papua Barat Tengah, Papua Tengah Utara, dan Papua Timur Selatan untuk periode tahun 2021 sampai dengan 2031.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. IKATAN, PERJANJIAN SIGNIFIKAN, DAN LAINNYA (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(vi) Kontinjensi

Berdasarkan PSAK 237: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi, suatu provisi harus diakui ketika terdapat kewajiban kini (hukum atau konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi, dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Pada bulan Oktober 2023, Grup menerima permintaan dokumen dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat ("SEC") terkait keterlibatan Telkom Infra dalam proyek dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("BAKTI Kominfo") terkait penyediaan infrastruktur 4G *Base Transceiver Station* ("BTS"). Sejak saat itu, SEC telah memperluas penyelidikannya mencakup isu-isu akuntansi dan pengungkapan yang terkait dengan pengakuan pendapatan dan praktik pelaporan keuangan serta pengendalian internal atas pelaporan keuangan Grup, termasuk laporan publik mengenai proses hukum tertentu di Indonesia yang melibatkan Grup, beberapa entitas anak dan afiliasinya, serta beberapa klien dan pemasok Grup. Sejak Mei 2024, Grup juga telah menerima permintaan tambahan untuk informasi dari Departemen Kehakiman A.S. ("DOJ") terkait kepatuhan terhadap Undang-Undang Praktik Korupsi Asing A.S. ("FCPA"). SEC dan DOJ saling mengetahui atas masing-masing penyelidikan yang sedang terjadi. Pada tanggal 31 Desember 2024, penyelidikan oleh SEC dan DOJ masih berlangsung. Grup bekerja sama dengan SEC dan DOJ dan telah menunjuk penasihat hukum eksternal untuk melakukan penyelidikan internal terhadap isu-isu yang sedang berlangsung.

Terkait permintaan-permintaan dari SEC mengenai proyek dengan BAKTI Kominfo dan DOJ terkait kepatuhan terhadap FCPA, saat ini Grup belum dapat mengestimasi secara wajar potensi kerugian atau rentang kerugian yang mungkin terjadi, karena permintaan tersebut masih berada pada tahap awal dan terdapat ketidakpastian yang cukup besar terkait waktu atau penyelesaian akhir dari penyelidikan, yang dapat mencakup denda, sanksi, atau dampak terhadap bisnis, jika ada.

Terkait dengan penyelidikan terhadap isu-isu akuntansi dan pengungkapan Grup yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan serta praktik pelaporan keuangan dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan, berdasarkan penilaian Grup yang dilakukan sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, saat ini Grup tidak berkeyakinan penyelidikan tersebut akan menimbulkan dampak material yang merugikan terhadap laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 2024.

Namun demikian, terdapat kemungkinan kinerja keuangan di masa mendatang dapat terdampak secara material yang disebabkan perubahan penilaian dari permintaan-permintaan yang telah disebutkan di atas dari SEC atas proyek dengan BAKTI Kominfo, DOJ terkait dengan kepatuhan terhadap FCPA, serta penyelidikan atas isu-isu akuntansi dan pengungkapan Grup.